

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹ Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara

¹ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal 38.

² Bolmer Hutasoit. *Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Radbruch*, <http://bolmerhutasoit.wordpress.com>. Diakses tanggal 12 Desember 2016.

jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³

Hukum harus dipahami dan diterapkan sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dengan hukum tertulis (*law in the books*). Hukum merupakan *a tool of social engineering*⁴ (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat).

³ Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Astim Riyanto. 2003. *Filsafat Hukum*. Bandung, Yapemdo. Hal 405.

Hukum juga dapat menjadi sebuah instrumen sosial. Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, hukum dapat tampil ke depan menunjukkan arah dan memberikan perubahan.⁵ Namun seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks termasuk di dalamnya perkembangan berbagai bentuk tindak pidana. Munculnya tindak pidana tersebut juga bersamaan dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para pelaku sebagai akibat dari perbuatannya. Sanksi pidana tersebut bervariasi jenisnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Sebagai salah satu jenis pidana, pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada.⁶ Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷ Dan Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan pidana mati sebagai sanksi dari suatu tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Bunyi dari Pasal 10 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :⁸

⁵ Mochtar Kusuma Atmaja. 1976. *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung, Binacipta. Hal 1.

⁶ Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 104.

⁷ Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 120.

⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 10 : Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
 - 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak ertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa pidana mati adalah pidana yang berada pada urutan pertama hirarki pidana pokok. Artinya pidana mati mengandung teori pidana absolut, yaitu pidana terberat sebagai upaya pembalasan terhadap para terpidana dan juga sebagai tindakan preventif kepada masyarakat luas. Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.⁹

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala

⁹ R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 187.

Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.¹⁰ Undang-Undang 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menegaskan bahwa :

Pasal 1 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.¹¹

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Kewenangan Kepala Negara dalam memberikan grasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Humphrey Ejike Jefferson merupakan salah seorang terpidana mati yang mencoba peruntungannya untuk mengajukan grasi. Humphrey adalah terpidana mati asal Nigeria yang ditangkap di Depok, Jawa Barat pada tahun 2003 karena kedapatan memiliki 1,7 kg heroin. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Humphrey Ejike alias Doctor dengan tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengeluarkan, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar

¹⁰ Leden Marpaung, *Loc.cit.*

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

narkotika Golongan I berupa narkotika jenis heroin.¹² Humprey terbukti bersalah dan akhirnya diputuskan dengan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian putusan itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ketika mengajukan banding serta Mahkamah Agung ketika mengajukan kasasi. Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali yang diajukan pada tahun 2007.¹³ Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perjalanan kasus Humprey Ejike Jefferson¹⁴ :

Tabel 1.1
Perjalanan Kasus Humprey Ejike Jefferson

Tanggal	Keterangan
2 Agustus 2003	Tertangkap polisi
9 Maret 2004	Penuntutan
6 April 2004	Humprey dihukum dengan hukuman mati berdasarkan putusan Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST
April 2004	Mengajukan banding
22 Juni 2004	Putusan Pengadilan Tinggi No. 76/Pid/2004/PT.DKI Menguatkan putusan PN Jakarta Pusat No. 2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.
Juli 2004	Mengajukan kasasi
4 November 2004	Putusan Mahkamah Agung No. 1715 K/Pid/2004 Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Humprey)
16 Mei 2006	Peninjauan Kembali
27 September 2007	Putusan Peninjauan Kembali No. 18 PK/Pid/2007 Peninjauan kembali ditolak
25 Juli 2016	Mengajukan permohonan grasi ¹⁵
26 Juli 2016	Pemberitahuan eksekusi
29 Juli 2016	Eksekusi

Sumber : Putusan No. 18.PK/Pid/2007

¹² Putusan No. 18.PK/Pid/2007

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Aris Andrianto, *LBH Sebut Eksekusi Mati Humprey Jefferson Tidak Sah*, <http://news.liputan6.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Namun tidak seperti dalam undang-undang grasi sebelumnya yang tidak membatasi jenis pembedaan, pada undang-undang ini dilakukan pembatasan atau persyaratan dalam permohonan grasi.

Disebutkan bahwa pembedaan yang dapat dimohonkan grasinya adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdiri dari tiga unsur yaitu pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (tahun).¹⁶ Hal ini merupakan perbedaan pertama dengan undang-undang sebelumnya (UU No 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi), dan memperjelas kepastian atas jenis-jenis pembedaan yang dapat dimohonkan grasinya dan menghindarkan adanya praktik curang terpidana untuk menghindari pelaksanaan hukumannya. Kata “dapat” dalam pasal tersebut berarti terpidana diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan grasi sesuai Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Ketentuan-ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi:

¹⁶ Pasal 2 ayat (2) UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden;
- 2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun;
- 3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Ketentuan lain yang diubah yaitu Pasal 7 ayat (2), mengenai permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada 15 Juni 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait permohonan pengujian Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi). Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 (UU Grasi Perubahan) berbunyi :

“Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam Putusan bernomor No 107/PUU-XII/2015, MK memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana. Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) pengajuan grasi oleh terpidana. Dengan adanya putusan ini maka seluruh terpidana, khususnya terpidana mati seharusnya dapat mengajukan grasi kapan saja tanpa ada ketentuan tenggat waktu yang bersifat prosedural.

Tabel 1.2
Perbandingan Rumusan Grasi dalam UU Grasi,
Perubahan UU Grasi & Putusan MK

UU No 22 Tahun 2002 (UU Grasi Sebelum Perubahan)	UU No. 5 Tahun 2010 (UU Grasi Setelah Perubahan)	Putusan MK No 107/PUU-XII/2015
Pasal 7 ayat (2)	Pasal 7 ayat (2)	Pasal 7 ayat (2)
permohonan grasi tidak dibatasi tenggat waktu	Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap	permohonan grasi tidak dibatasi tenggat waktu

Namun nasib Humprey ternyata tetap berakhir di tiang penembakan. Humprey Ejike Jefferson dieksekusi mati pada tanggal 29 Juli 2016. Padahal, LBH Masyarakat telah mendaftarkan permohonan grasi atas nama Humprey Ejike Jefferson pada hari Senin, 25 Juli 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi nomor: 01/grasi/2016. Berikut ini merupakan pemberitaan dari media massa mengenai eksekusi terpidana mati Humprey Ejike Jefferson

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memprotes masuknya nama Humprey Ejike atau Humprey Jefferson dalam daftar eksekusi mati jilid III.

"LBH Masyarakat telah mendaftarkan permohonan grasi atas nama Humprey Jefferson pada hari Senin, 25 Juli 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi nomor: 01/grasi/2016," kata pengacara LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, Rabu (27/7/2016).

Ia mengatakan, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dijelaskan, permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pembedaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

"Makna pasal ini cukup jelas, bahwa dengan didaftarkan grasi dan selama putusan grasi belum keluar, pelaksanaan eksekusi mati terhadap Humprey Jefferson tidak dapat dilakukan dan dibenarkan secara hukum," kata dia.

Ia menyebutkan, Humprey Jefferson sendiri mengalami banyak pelanggaran *fair trial* atau hak atas pelanggaran yang jujur. Pertama, kasusnya direkayasa. Individu yang menjebakanya, yaitu Kelly, mengakui

penjebakan tersebut. Kelly kini sudah meninggal, tetapi sebelum meninggal Kelly sempat mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Humprey.

Kejadian ini disaksikan oleh tujuh saksi dan kesaksian tersebut telah diserahkan sebagai bukti Peninjauan Kembali. Tetapi oleh Mahkamah Agung kesaksian tersebut tidak dianggap memiliki kekuatan pembuktian.

Kedua, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana mati terhadap Humprey Jefferson mengandung pertimbangan hukum yang rasis. Disebutkan di dalam putusan tersebut menimbang bahwa orang-orang kulit hitam yang berasal dari Nigeria sering menjadi pengawasan pihak Kepolisian.

Menurut dia, bahwa mungkin benar banyak warga Nigeria terlibat peredaran gelap narkoba, tetapi bukan berarti semua warga Nigeria pasti terlibat.¹⁷

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut diatas yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul **ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI TERPIDANA MATI HUMPREY EJIKE JEFFERSON (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015).**

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 jika dikaitkan dengan eksekusi terpidana mati Humprey Ejike Jefferson yang telah mengajukan grasi?

¹⁷ Aris Andrianto, *LBH Sebut Eksekusi Mati Humprey Jefferson Tidak Sah*, <http://news.liputan6.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2016.

2. Apakah pelaksanaan eksekusi Humprey Ejike Jefferson telah memenuhi unsur kepastian hukum serta nilai-nilai penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 jika dikaitkan dengan eksekusi terpidana mati Humprey Ejike Jefferson yang telah mengajukan grasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pelaksanaan eksekusi Humprey Ejike Jefferson telah memenuhi unsur kepastian hukum serta nilai-nilai penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, pemenuhan unsur kepastian hukum, pemenuhan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

- b. Diharapkan sebagai telaah, bahan koreksi dan dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, pemenuhan unsur kepastian hukum, pemenuhan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dan sebagai syarat akademis untuk mendapat gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.

2. Bagi Penegak Hukum

Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan menjadi sebuah informasi kepada para penegak hukum yang dimana masih terdapat unsur ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak terpidana dan menjadi bahan evaluasi terhadap aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak terpidana.

3. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang proses permohonan grasi bagi terpidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif / peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 10) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- 11) Putusan No. 18.PK/Pid/2007
- 12) Putusan No. 107/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, glossary, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen serta studi pustaka.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah analisa kesesuaian antara aturan yang ada dengan yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 Bab yang akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul skripsi serta menjadi dasar pengantar umum dalam memahami penulisan skripsi ini. Pada Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk membantu penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisikan uraian-uraian atau pembahasan dari pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Humprey Ejike Jefferson (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015).

4. BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.

